

KUALITAS UDARA JAKARTA BURUK Heru Budi Hartono Minta Warga Jabodetabek Naik Angkutan Umum

JAKARTA (IM) - Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan perbaikan kualitas udara Jakarta tidak bisa dilakukan pihaknya sendiri. Menurut dia butuh kolaborasi dengan pemerintah daerah sekitar (Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) juga warga-warganya.

"Soal industri-industri, sudah bergeser keluar kota Jakarta, tapi masih ada yang mengakibatkan pencemaran udara. Itu dari kendaraan roda dua dan roda empat, kata Heru Budi dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 secara daring, Selasa kemarin.

Heru memaparkan data 1,5 tahun terakhir, jumlah kendaraan bermotor roda empat yang masuk ke Jakarta meningkat. "Dari 4 juta menjadi 6 juta (unit)," ucap dia.

Begitu juga kendaraan roda dua yang sebelumnya 14 juta unit menjadi 16 juta unit.

"Jadi memang beban berat, tapi tidak mengurangi tanggung jawab pemerintah DKI Jakarta," ucapnya.

Mengatasi hal itu, Heru mengatakan pemerintah provinsi menambah kendaraan bus bertenaga listrik.

"Misal tahun ini dan 2 tahun ke depan kita menambah status bus," tuturnya.

Selain itu, Heru mengatakan kendaraan operasional Pemprov DKI Jakarta secara bertahap akan diganti ke kendaraan listrik.

Pemprov DKI, kata Heru, telah mengadakan program menanam pohon setiap Jumat untuk memperbaiki kualitas udara. "Saya juga setiap Selasa dan Jumat kalau ada waktu pasti menanam pohon," ucap dia.

Gerakan menanam pohon, menurut Heru, sudah dilakukan kurang dari 1 tahun terakhir dan sudah lebih dari 35 ribu pohon yang ditanam. Rinciannya 15 ribu pohon dan 20 ribu pohon berbuah.

Heru menilai apa yang dia lakukan tidak bisa terlihat dalam jangka pendek.

"Kami kami sampaikan, pemerintah daerah tidak lepas tanggung jawab," ucapnya.

Dia berharap semua masyarakat di Jabodetabek bersinergi dengan menggunakan transportasi umum untuk mengurangi kemacetan untuk mengurangi polusi udara. ● yan

PULUHAN KIOS LUDES

Kebakaran Landa Pasar Inpres Sabeni Tanah Abang

JAKARTA (IM) - Kebakaran hebat melanda Pasar Inpres Sabeni di Jalan Sabeni Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (9/8) pagi.

Kebakaran yang diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik ini mengakibatkan puluhan kios dan lapak pedagang ludes terbakar.

Kobaran api dengan cepat membakar bangunan kios dan lapak pedagang yang berada di Pasar Inpres Sabeni.

Banyaknya material kios dan lapak yang terbuat dari kayu membuat amukan si jago merah kian menjadi dan sulit dipadamkan.

Hanya dalam hitungan kurang dari 30 menit, api pun telah menghancurkan puluhan kios dan lapak pedagang.

Para pedagang dan warga sekitar panik dan berusaha menjauh dari lokasi.

Hal ini mengingat kawasan tersebut merupakan permukiman padat penduduk.

Aryono, salah seorang saksi mata mengatakan, api pertama kali muncul dari dalam salah satu kios di Pasar Inpres Sabeni. Api seketika membesar hingga akhirnya sulit dipadamkan.

"Lebih dari 30 kios yang terbakar kayaknya. Kalau dari tetangga sebelah katanya dari listrik kipas angin yang korslet. Kayaknya dari kios yang juga buat tempat tinggal," kata Aryono.

Belasan unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi langsung berupaya menjinakkan memadamkan kebakaran Pasar Inpres Sabeni agar tidak makin meluas.

Sekitar satu jam kemudian, kebakaran berhasil dipadamkan petugas. Namun, puluhan kios dan lapak pedagang telah hangus terbakar. ● yan

Heru Budi Imbau Sektor Swasta Buat WFH saat KTT ASEAN 5-7 September

JAKARTA (IM) - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengimbau agar perusahaan swasta menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (*work from home*/WFH) selama pelaksanaan konferensi tingkat tinggi (KTT) ASEAN pada 5-7 September mendatang.

Heru mengatakan kebijakan itu menjadi salah satu sumbangsih yang bisa diberikan pihak swasta untuk kelancaran acara KTT ke-43 ASEAN di Jakarta.

"Kami mengimbau untuk bisa memberikan sumbangsih kelancaran KTT ASEAN yang akan dilaksanakan tanggal 5-7 September, maka pihak-pihak swasta bisa memulai memikirkan misalnya *work from home* dengan kebijakan masing-masing," kata Heru dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 secara daring, Selasa

(8/8).

Kendati demikian, Heru menegaskan permintaan kepada pihak swasta untuk bekerja dari rumah itu bersifat imbauan.

"Untuk yang di luar dari perangkat daerah, swasta, dan lain-lain sifatnya adalah edaran dan imbauan," ujarnya.

Sementara itu, Heru memastikan bakal menerapkan kebijakan bekerja dari rumah bagi aparat sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kebijakan itu, lanjut dia, akan diatur melalui instruksi gubernur.

"Tapi kalau di wilayah Pemda DKI saya akan memastikan membuat keputusan instruksi gubernur, misalnya sekolah, gedung-gedung Pemda di sekitar titik lokasi nanti tempat kegiatan akan kami lakukan *work from home*," ucap Heru.

Sebagai informasi, Indonesia bakal menjadi tuan rumah KTT ASEAN ke-43 pada 5-7 September mendatang.

Selain negara-negara Asia Tenggara, KTT ASEAN itu juga akan dihadiri sejumlah negara tamu yang rutin hadir seperti China, Korea Selatan, Jepang, Australia, dan Selandia Baru. ● yan

PENGUMUMAN

Telah Kehilangan SK IMB Nomor 1103/IMB/1980 Tanggal 6 Maret 1980, atas nama PT. NUSA KIRANA QQ. DIANA SASTRAJAYA

Bagi pihak yang menemukan dapat menghubungi 08128691777

4 | Metropolis

FOTO: ANTARA



KEBAKARAN PASAR KAMBING KEBON MELATI

Warga mencari sisa barang pasca-kebakaran kios Pasar Kambing di Jalan Sabeni Raya, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (9/8). Kebakaran yang terjadi pukul 06.45 WIB tersebut menghancurkan 130 kios yang diduga akibat hubungan pendek arus listrik.

BEBANI WARGA KURANG MAMPU

Pimpinan DPRD Depok Minta Kenaikan Tarif Puskesmas Dibatalkan

APBD sudah seharusnya dialokasikan untuk pelayanan kesehatan, terkhusus untuk puskesmas. Pemerintah Kota Depok tidak seharusnya takut merugi saat mengalokasikan APBD untuk puskesmas.

DEPOK (IM) - Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo

minta Wali Kota Depok, Mohammad Idris membatalkan kenaikan tarif pelayanan

kesehatan di puskesmas. Dengan menaikkan tarif, M Idris meminta puskesmas mencari keuangan secara mandiri karena sudah berstatus badan layanan umum daerah (BLUD).

Puskesmas juga diminta tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

"Mendesak Wali Kota Depok membatalkan tarif kenaikan berobat ke pus-

kesmas," tegas Hendrik kepada awak media, Rabu (9/8).

Menurut dia, APBD sudah seharusnya dialokasikan untuk pelayanan kesehatan, terkhusus untuk puskesmas. Pemerintah Kota Depok tidak seharusnya takut merugi saat mengalokasikan APBD untuk puskesmas.

Hendrik mengingatkan, kebanyakan pasien yang datang ke puskesmas merupakan warga kurang mampu. "Bagi warga tidak mampu, itu (kenaikan tarif) membebani. Pemkot Depok harus menunjukkan keberpihakan terhadap warga tidak mampu," ujar Hendrik.

M Idris menaikkan tarif pelayanan kesehatan puskesmas se-Kota Depok menjadi Rp 10.000-30.000 mulai 7 Agustus 2023. Tarif pelayanan kesehatan untuk semua kategori itu sebelumnya adalah Rp 2.000.

Kenaikan tarif ini tertuang dalam Peraturan Wali kota (Perwal) Kota Depok Nomor 64 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Tarif Pelayanan

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Berkaitan dengan kenaikan tarif ini, Pemkot Depok membeberkan sejumlah alasan, salah satunya soal statusnya yang berubah menjadi BLUD. Idris menilai, kenaikan tarif pelayanan kesehatan di puskesmas sudah laik.

Sebelum menaikkan tarif puskesmas, Idris dan jajaran telah melakukan kajian.

"Ini (menaikkan tarif puskesmas) sudah melalui kajian yang panjang, maka kenaikan ini kami nilai sangat dibutuhkan," ucap Idris, Jumat (4/8).

Idris menyatakan, kenaikan tarif perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga medis non-pegawai negeri sipil (PNS).

Kemudian, kenaikan tarif juga dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas agar bisa mengurangi durasi antrean.

Tarif puskesmas untuk warga Depok dipatok Rp 10.000-15.000 dan warga non-Depok dipatok Rp 20.000-30.000. ● yan

BANYAK PELAT BESI JPO HILANG

Dinas Bina Marga DKI akan Pasang 53 CCTV di 11 Titik Fasilitas Publik

JAKARTA (IM) - Dinas Bina Marga DKI Jakarta menyatakan, akan memasang kamera pengawas (CCTV) di beberapa titik fasilitas publik. Hal itu menanggapi kasus pencurian pelat besi jembatan penyeberangan orang (JPO) yang berkali-kali terjadi di beberapa titik.

"Pada tahun 2023 ada pengadaan CCTV sebanyak 53 unit, yang rencana ditempatkan di 11 lokasi strategis, seperti underpass dan lokasi lainnya," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Bina Marga DKI, Heru Suwondo di Jakarta, Rabu (9/8).

Dengan adanya CCTV, ia berharap, langkah itu bisa meminimalisasi terjadinya hal-hal tidak diinginkan terhadap aset daerah. Termasuk, terjadi hilangnya komponen JPO yang merugikan para pejalan kaki saat menyeberangnya.

Kasus hilangnya pelat besi JPO terjadi beberapa kali hingga viral di media sosial. Di antaranya, JPO Sahabat di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat (Jakbar). JPO Sahabat telah berlubang akibat pelat besinya dicuri untuk yang ketiga kalinya sehingga penyeberangan terpaksa harus me-

nyeberang melalui jalan besar. Selain itu, pelat besi hilang juga terjadi di JPO Warung Gantung, Semanan di Jakbar.

Heru mengatakan, jajarannya telah melakukan perbaikan dengan mengelas sekeliling JPO agar tidak hilang lagi. Selain itu, pihaknya juga bekerja sama dengan tim keamanan untuk melakukan pengawasan lebih lanjut terhadap aset daerah.

"Bahwa terjadinya pencurian dan vandalisme di JPO dan aset kebinamargaan, kami telah melakukan koordinasi dengan Satpol PP tingkat wilayah untuk membantu melakukan pengawasan khususnya pada malam hari dan menindak bila terjadi vandalisme sesuai kewenangannya," ucap Heru.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI, Nurhasan, mengingatkan pemasangan pelat besi JPO seharusnya lebih cermat agar tidak mudah digondol maling. Hal itu menanggapi kasus pencurian pelat besi JPO yang terjadi berulang kali di kawasan Jakbar.

"Lembaran (pelat besi) sebesar itu kok bisa hilang. Menurut saya sih aneh kok masih ada yang hilang lembaran JPO, kan itu bukan lembaran

kecil," kata Nurhasan kepada wartawan di Jakarta, Senin (7/8).

Menurut anggota Komisi D DPRD DKI tersebut, pencurian biasanya terjadi lantaran kurangnya kualitas pemasangan pelat besi JPO. Meski begitu, ia mengakui, tidak terlalu paham tentang teknis pemasangan dari komponen di JPO.

"Kalau memang sebetulnya pemasangan itu benar dan tidak mudah dilepas, tentunya tidak ada pencurian kan gitu loh logikanya. Mungkin itu belum diikat pakai baut atau las logikanya itu kan kalau merekat kuat dan pakai tool atau mengikat kuat dengan rangkanya dengan rangka jembatannya, tentu enggak mungkin bisa dilepas," kata Nurhasan menerangkan.

Atas pandangannya itu, Nurhasan mendesak Dinas Bina Marga DKI untuk lebih teliti pula dalam melakukan pengawasan terhadap JPO. Sehingga diharapkan, kasus pencurian pelat besi JPO tidak terjadi lagi. "Perlu inspeksi dan juga pengawasan yang ketat dari Dinas Bina Marga atas hasil kerja (pembuatan JPO)," ucapnya. ● yan

FOTO: ANTARA



AKSI UNJUK RASA TOLAK GEOTHERMAL

Sejumlah pengunjuk rasa menggelar aksi di depan Kedutaan Besar Jerman, Jakarta, Rabu (9/8). Mereka mendesak Bank Pembangunan Jerman untuk segera mengevaluasi dan menghentikan pendanaan transisi energi dalam proyek geothermal di pulau Flores khususnya perluasan tambang panas bumi Ulumbu ke Poco Leok karena diduga membahayakan kesehatan dan ekosistem.

Dinas Pendidikan DKI: Tak Boleh Ada Toilet Gender Netral di Sekolah

JAKARTA (IM) - Dinas Pendidikan DKI Jakarta menegaskan sesuai aturan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, hanya ada dua jenis toilet di sekolah yakni toilet untuk pelajar laki-laki dan untuk pelajar perempuan. Dengan kata lain, sekolah tidak diperbolehkan membuat toilet gender netral.

Beleid yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).

"Nah, di standar sarpras itu, ya tersedia toilet untuk laki-laki untuk perempuan. Kemudian perbandingannya sekian dengan sekian, gitu. Jadi kita bukan kok berpendapat gimana-gimana. Kita pakai standar sarpras," kata Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Purwosusilo saat dikonfirmasi, Selasa (8/8) malam.

Hal ini disampaikan oleh Purwosusilo menanggapi adanya informasi yang disampaikan artis Daniel Mananta dalam video podcast-nya yang menyatakan ada sekolah swasta internasional di Jabodetabek yang menyediakan toilet gender netral.

Purwosusilo melanjutkan, pihaknya segera memeriksa kebenaran informasi tersebut dengan menghubungi pengawas-pengawas yang ada di

sekolah. "Belum, tapi belum semua. Orang jawab tidak ada, tidak ada. Hanya laki-laki dan perempuan, hanya ada pria dan wanita, ada yang laki-laki dan perempuan untuk siswa dan guru gitu. Ada untuk tamu," tutur dia.

Namun demikian, ia menegaskan pemeriksaan ini belum mencakup seluruh sekolah swasta internasional yang ada di DKI.

Untuk itu, ia pun berencana untuk melakukan rapat virtual melalui Zoom untuk menanyakan hal tersebut kepada satu per satu sekolah. Di sisi lain, ia tidak ingin mencampurkan sarana di sekolah terkait HAM siswa.

Ia menegaskan, sekolah harus menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Permendikbud yang ada.

"Standarnya jadi kalau sarana di sekolah itu kita ada Permendikbudnya, ada namanya standar sarpras, ada standar kompetensi lulusan, ada standar isi," tandasnya.

Ia pun meminta agar sekolah menjadi tempat edukasi yang baik kepada para peserta didik. Sehingga, ia meminta agar para pengelola sekolah mematuhi aturan yang ada.

Ia pun tak segan akan memberikan peringatan tegas apabila ada sekolah yang melanggar ketentuan.

"Di sekolah itu kan tempat edukasi kan. Pendidikan salah satunya ada di sekolah, ada di keluarga, di masyarakat. Nah, kalau di sekolah kami jaga betul terkait dengan taat pada regulasi yang ada," imbuhnya. ● yan